

PROBLEMATIKA DESA

Oleh :

Dr.Ir. Ali Hanapiah Muhi, MP

Pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak banyak orang terutama para pemerhati desa dan pembangunan adalah “Mengapa desa (secara umum) masih mengalami keterbelakangan atau tertinggal dalam pembangunan dan berbagai bidang lainnya ?”

Tidak mudah untuk memperoleh jawaban yang tepat terhadap pertanyaan tersebut. Mari kita mencoba untuk menyingkap tabir dibalik keterbelakangan yang dialami desa-desa di Indonesia. Keterbelakangan dapat didefinisikan dalam berbagai cara dengan melihat berbagai indikator. Berbagai indikator terkait dengan keterbelakangan tersebut, antara lain :

- Terjadinya kemiskinan;
- Masih terbelakangnya masyarakat dari aspek pendidikan, dengan kata lain masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan;
- Maldistribusi pendapatan nasional, meskipun pemerintah berulang kali menyatakan bahwa pendapatan perkapita mengalami kenaikan. Namun ternyata kenaikan pendapatan perkapita tidak merata kepada masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita cenderung bertumpuk pada segelintir orang dengan pendapatan perkapita yang meroket tinggi.
- Lemahnya administrasi;
- dan sebagainya.

Salah satu problematika desa yang cukup menonjol dan memerlukan perhatian semua pihak adalah Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Masih Terbatas.

▪ **Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Masih Terbatas**

Sebahagian besar sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia berada di wilayah pedesaan. Berbagai potensi sumber daya alam yang menonjol antara lain potensi hutan, potensi lahan atau tanah, potensi pertambangan, potensi perairan dan kelautan, dan berbagai potensi produktif lainnya.

Berdasarkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dan penyebarannya yang hampir merata pada semuanya wilayah terutama di wilayah pedesaan. Semestinya rakyat yang sebahagian besar berdomisili di wilayah pedesaan berada pada posisi yang paling menguntungkan dalam menikmati kekayaan alam tersebut. Melihat kekayaan alam yang melimpah berada di wilayah pedesaan, idealnya rakyat Indonesia berada dalam level kehidupan yang berkategori keluarga sejahtera dan

bukan pada level kehidupan yang berkategori keluarga pra sejahtera dan keluarga miskin.

Suatu ironi terjadi pada negara kita yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau termasuk kelompok pra sejahtera dan miskin. Kondisi tersebut tentu memunculkan berbagai tanda tanya dalam diri kita. Apa yang sesungguhnya terjadi di negeri yang kita cintai dan banggakan ini ? Kenapa kondisi ini terjadi ? Apa yang keliru dengan kekayaan alam kita ? Kemana perginya potensi alam kita yang maha kaya tersebut ? Jika dilihat secara cermat dan kritis akan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat.

Banyak fakta menunjukkan bahwa sebagian terbesar sumber daya alam Indonesia berada di daerah pedesaan. Keberadaan sumber daya alam Indonesia yang mayoritas berada di daerah pedesaan, ternyata tidak berbanding lurus dengan penguasaan sumber daya alam tersebut oleh masyarakat pedesaan. Sebagai contoh kita lihat sumber daya perkebunan kelapa sawit, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) *dalam* Suhendra, *detikFinance* (2010), bahwa dari total luas lahan sawit secara nasional, penguasaannya terbagi menjadi 8 persen milik PTPN, 15-20 persen milik investor asal Malaysia, 34 persen milik petani, dan sisanya milik investor lainnya. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia *dalam* Setrawati, N., *detikFinance* (2010) mengemukakan bahwa total luas lahan perkebunan kelapa sawit secara nasional adalah 20,86 juta hektar.

Lahan pertanian irigasi seluas 7,3 juta hektar telah mengalami penyusutan menjadi 4,3 juta hektar. Terjadinya penyusutan luas lahan pertanian irigasi disebabkan oleh peralihan fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lain nonpertanian, seperti industri, kawasan pemukiman (perumahan *real estate*), dan sebagainya (Direktur Perkotaan dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional *dalam* MI, 2010). Peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian produktif menjadi lahan nonpertanian disertai dengan peralihan kepemilikan dari petani kepada mereka-mereka yang memiliki modal besar yaitu para pengusaha.

Sesuatu yang mengkhawatirkan adalah rendahnya penguasaan sumber daya alam oleh masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat pedesaan sebagai tamu di rumahnya sendiri. Coba kita jalan-jalan ke suatu desa baik di pulau Jawa maupun di pulau-pulau lainnya. Kita akan menemukan masyarakat desa yang terisolasi di desanya. Kawasan pemukiman penduduk di daerah pedesaan yang semakin terbatas dan ruang gerak masyarakat yang semakin menyempit. Ada apa dengan daerah pedesaan ? Kalau kita mau sedikit peduli, cobalah untuk bertanya kepada mereka yang berdomisili di daerah pedesaan. Maka kita akan memperoleh berbagai informasi tentang banyak hal yang mencengangkan. Masyarakat terisolasi dalam kawasan pemukiman yang semakin terbatas, dikarenakan lahan-lahan di luar kawasan pemukiman penduduk telah menjadi milik orang lain. Pemilik lahan sangat mungkin tidak dikenal secara pasti oleh warga masyarakat desa, karena pemilik tersebut bukan berasal dari desa setempat. Pemilik baru lahan berasal dari daerah lain, dan sangat mungkin mereka berasal dari daerah perkotaan. Orang-orang tersebut adalah mereka yang memiliki banyak uang, untuk mengamankan kekayaannya mereka berinvestasi dalam bentuk tanah di daerah pedesaan. Tanah

mereka beli dari masyarakat dengan harga yang relatif murah. Atau para investor berkolaborasi dengan penguasa melalui berbagai bentuk seperti Hak Penguasaan Hutan (HPH), pengembangan kawasan industri, Hak Guna Usaha (HGU) dan lain-lain.

Hal yang mirip terjadi pada semakin terbatasnya ruang gerak masyarakat di daerah pedesaan. Pada masa lalu, warga masyarakat di daerah pedesaan memiliki keleluasaan bergerak di wilayah perkampungannya baik di kawasan perladangan, persawahan, rawa, pinggir danau, pinggir laut, kawasan hutan dan sebagainya untuk mencari sesuatu yang mereka perlukan dan tersedia di alam bebas. Masyarakat dapat secara bebas mencari ikan, kepiting, kerang dan sebagainya di kawasan pantai, danau, rawa, atau sungai. Masyarakat dapat secara bebas mencari sarang lebah (madu), mencari getah, mencari rotan, mencari kayu bakar, hewan buruan dan sebagainya di kawasan hutan. Kini hal itu tidak dapat lagi mereka lakukan secara bebas. Karena kawasan perladangan, persawahan, rawa, pinggir danau, pinggir laut, kawasan hutan telah menjadi hak orang lain atau pihak lain. Pemilik lahan atau kawasan tersebut boleh jadi tidak dikenal atau dikenal hanya dengar nama oleh warga masyarakat setempat. Karena pemilik baru lahan-lahan di wilayah pedesaan berasal dari kalangan elit perkotaan atau daerah lain di luar desa.

Kondisi seperti itu, seringkali tidak menguntungkan bagi masyarakat di daerah pedesaan. Penguasaan sumber daya alam yang semakin mengecil oleh masyarakat setempat, menyebabkan semakin terpinggirkan peluang masyarakat untuk mengelola, menggarap dan memanfaatkan sumber daya alam daerahnya sendiri. Masyarakat desa menjadi tamu di rumahnya sendiri dan menjadi terasing di kampung sendiri. Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan memunculkan rasa frustrasi dan kehilangan asa akan hari depan yang lebih baik bagi masyarakat. Kondisi ini tidak akan membawa masyarakat ke arah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, hal ini justru akan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Dimana keberpihakan negara dan pemerintah terhadap nasib dan masa depan rakyatnya ?

Terkait dengan penguasaan sumber daya alam di daerah pedesaan. Berbagai fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi, yaitu konflik atas penguasaan sumber daya alam antara masyarakat desa dengan para investor. Berikut cuplikan beberapa konflik antara warga desa dengan pihak investor :

▪ **Warga Binjai-PTPN Berebut Lahan Galian**

Liputan6.com, Binjai: Ratusan warga melempari aparat gabungan dengan lumpur di Kota Binjai, Sumatra Utara, Jumat (19/11). Keributan warga dan aparat gabungan TNI-Polri ini dipicu penutupan lokasi galian C di eks lahan PTPN II di Kelurahan Bhakti Karya.

Peristiwa ini berawal saat ratusan aparat gabungan mendatangi lokasi galian C. Warga yang menolak upaya penutupan lokasi berusaha bertahan dengan memarkirkan sebuah truk di tengah jalan yang menjadi akses menuju lokasi galian.

Ketika petugas berusaha membuka jalan dengan mendorong truk, ratusan warga bereaksi melempari petugas dengan lumpur. Aparat pun kemudian membubarkan diri. Menurut pihak PTPN, penutupan

lokasi galian C karena lokasi tersebut adalah lahan milik PTPN II yang dikuasai masyarakat.

Namun, warga menyatakan lahan tersebut merupakan lahan nenek moyang mereka yang telah lama dikuasai atau tanah adat ulayat warga setempat.(ADO).

▪ **Kericuhan Mewarnai Demo Tolak Newmont**

Liputan6.com, Jakarta: Warga dan mahasiswa Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali berdemonstrasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5). Demo yang dilakukan untuk ketiga kalinya ini sempat diwarnai kericuhan.

Para demonstran terlibat saling dorong dengan polisi saat mencoba menerobos barikade aparat. Namun, koordinator aksi dapat mengendalikan massa sehingga bentrokan lebih parah bisa dihindarkan.

Dalam orasinya, pengunjung rasa menuntut Kemenkeu membagi keuntungan hasil eksplorasi emas PT Newmont untuk daerah sebesar 70 persen. Dana ini sedianya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat NTB sendiri.

Para demonstran pun mengancam akan terus melancarkan aksi serupa. Terutama hingga tuntutan mereka dipenuhi [baca: Warga NTB Tuntut Hasil Eksplorasi Emas].(APY/ANS).

▪ **Petani Penggarap Minta Bantuan LBH Terkait Lahan HGU**

CIANJUR, (PRLM).- Perwakilan petani penggarap lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kampung Cibolang Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cianjur. Mereka berharap LBH Cianjur bisa memperjuangkan nasibnya sehingga bisa tetap menggarap lahan yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarganya. Sebab para petani penggarap khawatir kehilangan mata pencaharian, menyusul adanya rencana pihak perusahaan akan memperpanjang izin HGU sekaligus menggunakan lahan yang selama ini digarap petani.

Salah seorang perwakilan petani penggarap, Asep Dimiyati (48) asal Kampung Cibolang Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Selasa (12/10) mengungkapkan, harapannya agar LBH Cianjur bisa membantu permasalahan hukum agraria yang sedang dihadapinya. "Kami minta bantuan hukum atas permasalahan yang sedang kami hadapi dengan pihak perusahaan. Kami ingin tetap bisa menggarap lahan itu karena merupakan tumpuan hidup keluarga," ujarnya di Kantor LBH Cianjur, Jl. Siti Bodedar Kaum Cianjur.

Menyikapi hal tersebut, Ketua LBH Cianjur, D. Muharam Junaedi mengatakan, pihaknya berjanji akan mengadvokasi ratusan petani penggarap terkait permasalahan agraria dengan pemilik ijin Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang sudah lama digarap petani. Dia menegaskan, pihaknya siap memperjuangkan nasib petani penggarap sampai rencana pengambil-alihan lahan oleh perusahaan pemilik izin HGU tidak jadi dilaksanakan. Sebab pihaknya menilai semangat reforma agraria saat ini masyarakat mempunyai hak hidup sejahtera untuk mengelola tanah negara.

“Warga di sana sudah lama menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam di atas lahan tersebut, kalau sampai diambil alih oleh pihak perusahaan, lalu ke depannya mereka akan seperti apa,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan menempuh sejumlah upaya mediasi dan hukum terkait permasalahan tersebut. Misalnya, mengirimkan lembaran surat penolakan warga atau petani penggarap ke sejumlah pihak terkait termasuk ke presiden RI. “Melalui surat kami mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar tidak memperpanjang ijin HGU dari perusahaan bersangkutan yang akan habis pada Desember 2010 mendatang,” ujarnya.

Dijelaskan, bila HGU itu diperpanjang, rencananya lahan tersebut akan dijadikan perkebunan Albasia seperti disampaikan pihak perusahaan kepada warga setempat. Itu artinya akan menggusur para petani yang selama ini menggarap lahan disana. Selain itu, pihak perusahaan akan memberikan konvensasi, tetapi nilai yang akan diberikan perusahaan sebesar Rp 300/m² sangat tidak manusiawi dan sama artinya dengan upaya pengusiran secara halus terhadap keberadaan warga di atas lahan tersebut.

"Ini menyangkut politik perijinan yang sangat menyengsarakan rakyat, kalau dibiarkan rakyat bisa marah," ujarnya. Pihaknya meminta pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas di atas lahan tersebut karena dikhawatirkan akan memancing emosi petani penggarap, sehingga bisa memicu terjadinya konflik horizontal. (A-116/das)***

▪ **Lahan Digusur PTPN IV, Warga Protes**

Liputan6.com, Simalungun: Eksekusi lahan pertanian warga oleh pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Pulo Sarana Blok 9, Kecamatan Bosar Maligas, Simalungun, Sumatra Utara, Jumat (19/11), berakhir ricuh. Warga tak terima bila lahan yang telah mereka garap secara turun-temurun diklaim sebagai milik PTPN IV.

Massa yang protes menghadang kedatangan pihak PTPN di lahan mereka. Bentrokan antar warga pun tak terhindarkan karena pihak PTPN IV melibatkan kelompok Petani Madani Pulo Sarana.

Ratusan polisi yang mengawal aksi ini bahkan sempat kewalahan karena warga langsung bergerak saat alat berat hendak dioperasikan menggusur lahan seluas 141 hektar yang sudah digarap sejak 54 tahun lampau. Beberapa warga mengalami luka-luka setelah terkena pukulan polisi yang lebih membela pihak PTPN IV ketimbang warga.(MRQ/ANS).

▪ **Tuntut Lahan, 300 Petani Lereng Kelud Geruduk Pengadilan**

Kediri - Ratusan petani lereng Gunung Kelud di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, kembali mendatangi Pengadilan Negeri (PN), Senin (30/5/2011). Mereka menuntut penyelesaian kasus sengketa tanah antara warga dengan perkebunan PTPN 12.

Sempat terjadi aksi dorong dalam aksi ini. Pasalnya, saat massa tiba di Pengadilan Negeri, mereka langsung memaksa masuk ke ruang sidang untuk mengikuti jalannya persidangan.

Namun khawatir akan mengganggu jalan persidangan, polisi yang menjaga pengadilan langsung menghalau massa untuk tidak masuk ruang sidang.

"Kembalikan tanah kami, petani butuh hidup, pak polisi sudah bosan lihat kami datang ke sini, jangan perpanjang masalah ini," teriak salah seorang warga.

Suhardi, koordinator aksi kepada wartawan mengatakan tujuan 300 petani ini adalah untuk memberikan tekanan terhadap jalannya sidang kasus sengketa perkebunan antara PTPN 12 dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi dari pihak PTPN.

"PTPN harus mengembalikan 124 hektar lahan yang dikuasai PTPN kepada warga. Karena lahan itu adalah milik warga," ungkap Suhardi, kepada detiksurabaya.com.

Dari pengamatan detiksurabaya.com, ratusan petani ini datang ke Pengadilan Negeri di Jalan Pamenang dengan menumpang 5 truk. Massa juga membawa bendera merah putih dan spanduk yang bertuliskan menuntut pihak pengadilan untuk berpihak kepada warga.

Kasus sengketa perebutan lahan perkebunan seluas 124 hektar ini terjadi sejak tahun 1966 silam. **(bdh/bdh)**.

Selain itu, sumber daya alam di pedesaan kurang termanfaatkan secara baik dan optimal. Indonesia yang dikaruniai sumber daya alam melimpah seperti tanah yang relatif subur, kawasan hutan yang luas dan kaya berbagai bahan tambang seperti emas, timah, batu bara, tembaga, seng, bauksit, bijih besi, minyak bumi, gas alam, belerang, dan lain-lain. Pada hakekatnya bangsa ini tidak kekurangan tanah (lahan), bahan mineral, air, hutan, bahan tambang dan berbagai sumber daya alam lainnya. Namun kenyataan yang dihadapi seolah-olah bangsa Indonesia sebagai

negara yang sangat minim sumber daya alam. Memang suatu kenyataan yang sangat ironis, bangsa yang dikenal kaya dengan sumber daya alam dan didukung jumlah penduduk yang relatif besar, tetapi masih terbelenggu masalah kemiskinan dan kemelaratan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kita menghadapi persoalan yang serius dalam pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Sumber daya alam yang melimpah belum menjamin suatu bangsa akan makmur dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi. Jika sumber daya alam tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan ada gejala pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tidak bijaksana dan tidak optimal. Akibatnya kerusakan lingkungan dan ekosistem yang terjadi di Indonesia pada dekade terakhir terasa begitu dahsyat. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan diperlukan kesadaran, keterampilan, keahlian dan kepedulian dari manusia pengelolanya.

Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal dapat kita lihat dari berbagai aspek, salah satunya aspek produksi. Masyarakat belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mendiversifikasi produk. Saat ini pengelolaan sumber daya alam kita lebih didominasi oleh pemanfaatan lahan untuk menghasilkan produk bahan dasar, seperti bahan pangan (padi, singkong, jagung, sayuran, buah-buahan dan lain-lain) dan berbagai bahan kebutuhan pokok lainnya. Baru sebahagian kecil dari produk hasil pertanian yang diolah lebih lanjut menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah. Contoh : petani secara turun-menurun menanam padi untuk menghasilkan padi dan beras. Padahal dari bahan dasar beras banyak ragam dan macam produk lain yang dapat dihasilkan dengan nilai tambah yang tinggi. Misalnya, beras dapat diolah untuk menghasilkan tepung beras. Tanaman jagung yang ditanam oleh petani, sebagian besar hanya berorientasi untuk menghasilkan buah jagung yang langsung dikonsumsi atau dijual ke pasar. Padahal jagung dapat diolah untuk menghasilkan berbagai produk baru yang memiliki nilai tambah dan keuntungan yang lebih besar. Misalnya jagung dapat diolah menjadi tepung meizena, jagung dapat diolah untuk menghasilkan minyak dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan produk-produk pertanian lainnya, memiliki peluang yang besar untuk dapat diolah dan didiversifikasi menjadi berbagai produk baru yang memiliki nilai tambah yang besar. ****

Tulisan ini cuplikan dari isi buku yang berjudul : ***“DESA : Tantangan dan Harapan”***
Penulis : Dr. Ir. Ali Hanapiah Muhi, MP
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, 2011.